



**MERAIH HIDUP SEHAT  
DENGAN PROGRAM PAPSMEAR  
(KISAH PETANI PEREMPUAN DI DESA  
PENIWEN, KABUPATEN MALANG)**

Fits Radjah

**A**dalah sebuah realitas bahwa lebih dari 50% total penduduk yang tinggal di daerah pedesaan di Indonesia adalah perempuan yang berprofesi sebagai petani (selanjutnya disebut petani perempuan). Namun, keberadaan kelompok profesi terbesar ini dalam kehidupan masyarakat pedesaan yang masih kental dengan budaya patriarki, dianggap sebagai kelompok yang tidak nyata (*invisible group*). Ketidakterlihatan petani perempuan ini menyebabkan banyak kepentingan mereka baik sebagai individu maupun sebagai kelompok terabaikan, termasuk salah satunya adalah yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi (*kespro*) mereka sebagai seorang perempuan yang memiliki hak otonom terhadap tubuhnya sendiri.

Demikian pula halnya dengan kondisi petani perempuan yang berada di Desa Peniwen, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang. Dari total penduduk sebesar 3.300 jiwa, sebagian besar adalah petani perempuan. Rata-rata tingkat pendidikan formal mereka adalah lulus Sekolah Dasar, dengan akses dan sumber daya ekonomi yang terbatas atau kecil. Desa Peniwen sendiri adalah sebuah desa yang terletak di lereng sisi Barat Gunung Kawi: berjarak sekitar 35 km ke arah Selatan dari kota Malang, dan atau sekitar 15 km dari Kepanjen, ibukota Kabupaten Malang.

Sebagai petani perempuan, persoalan-persoalan yang menyangkut kespro sangatlah kompleks. Anggapan "tabu" untuk membicarakan kespro secara terbuka dengan orang lain yang masih dianggap asing, dan terkadang (bahkan) termasuk kepada bidan desa sekalipun, menjadi salah satu penyebab mengapa banyak penanganan kasus kespro terabaikan. Belum lagi dengan ketidakbiasaan untuk mengalokasikan dana secara khusus yang akan diperuntukkan bagi keperluan kesehatan keluarga (apalagi untuk kepentingan kespro perempuan) belum menjadi prioritas, seringkali menyebabkan penanganan kasus-kasus kespro mengalami keterlambatan.

Berangkat dari masalah-masalah tersebut di atas, untungnya para petani perempuan di desa Peniwen membentuk kelompok-kelompok tani perempuan. Salah satu tujuannya adalah agar mereka dapat saling belajar secara bersama-sama, dengan menggunakan tempat, bahasa dan contoh yang sehari-hari sudah mereka kenal sebagai seorang petani. Hal ini menjadi sangat penting untuk memasukkan masalah-masalah kesehatan reproduksi, apalagi mengingat bahasa-bahasa teknis kesehatan (termasuk kespro) cukup sulit untuk dimengerti, dipahami dan diingat oleh mereka.

Sebagai contoh, dalam proses pembelajaran dan pemahaman di kelompok mereka tentang terjadinya Kanker Leher Rahim (*cervix cancer*). Karena latar belakang mereka adalah petani padi, maka proses pembelajaran pun dilangsungkan di sawah, dengan melakukan pengamatan terhadap tanaman padi yang sudah masuk pada fase generatif dan terserang penyakit *hawar daun*. Kemudian secara bersama-sama mengeksplorasi pengalaman mereka tentang penyakit tersebut, termasuk sampai pada bagaimana cara mereka mengatasinya. Selanjutnya, diskusi dilanjutkan dan berlangsung di rumah salah

seorang anggota kelompok (sekretariat kelompok) untuk membicarakan pentingnya seorang perempuan usia produktif untuk melakukan tes *papsmear* sebagai cara pencegahan melalui pendektesian dini adanya kanker, mengingat penyakit ini dapat mengakibatkan kematian bila penanganannya terlambat.

Dengan model pembelajaran seperti tersebut di atas yang mereka sebut dengan "sekolah lapang", prinsip-prinsip utama yang berkaitan dengan kanker leher rahim yang masih banyak diderita oleh kaum perempuan di Indonesia dapat mereka pahami dengan baik dan benar sesuai dengan kapasitas mereka sebagai seorang petani perempuan yang bertempat tinggal di desa. Hal ini menjadi sangat penting dalam menumbuhkembangkan kesadaran mereka untuk melakukan upaya-upaya preventif (pencegahan) oleh dan bagi kepentingan mereka sendiri.

Pada tahun 2003 yang lalu, ada 2 orang perempuan di desa Peniwen yang meninggal dunia akibat kanker leher rahim yang sudah akut sehingga tidak tertolong lagi walau telah dibawa ke rumah sakit. Kasus ini secara langsung telah memberi dampak positif terhadap kesadaran para petani perempuan untuk melakukan tes *papsmear*. Melalui diskusi kelompok mereka menemukan bahwa hal tersebut terjadi karena ketidaktahuan almarhumah (dan keluarganya) dan terlambat mendeteksi penyakit tersebut karena almarhumah tidak pernah melakukan tes *papsmear*.

Belajar dari 'kesalahan' orang lain, menimbulkan kesadaran mereka akan pentingnya manfaat dan kegunaan *papsmear*, maka mereka pun melakukan sosialisasi kepada keluarga, kerabat, teman dan masyarakat Peniwen lainnya. Cara yang ditempuh bermacam-macam tergantung situasi dan kondisi. Contohnya, kepada anggota keluarga, kerabat dan teman dekat, biasanya dilakukan melalui diskusi ringan/obrolan santai pada saat mereka beranjangsana (*sowan* – bahasa Jawa) ke rumah yang bersangkutan, atau ketika mereka secara bersama-sama menjadi peserta 'mbhiado' (diambil dari bahasa Jawa: salah satu bentuk kegiatan gotong-royong yang masih kuat tumbuh dan dipelihara oleh masyarakat desa Peniwen, yaitu sebuah kegiatan dimana mereka berkumpul, saling membantu ketika salah seorang di antara keluarga/kerabat mereka menyelenggarakan pesta yang membutuhkan banyak sumberdaya dana dan manusia).

Selain itu, kesempatan menyebarluaskan informasi tentang tes *papsmear* ini juga mereka salurkan ketika secara bersama-sama mengekspresikan diri mereka dalam kesenian yang disebut “*Kotekan Lesung*”. Melalui lantunan tembang-tembang Jawa, mereka menyampaikan pesan dan ajakan untuk ikut *papsmear*, dengan diiringi hentakan-hentakan berirama alu penumbuk padi pada lesungnya yang mereka mainkan secara harmoni. Pola berkesenian dalam kehidupan mereka sembari bekerja ini mampu menyedot perhatian banyak orang dari segala tingkat usia untuk berkumpul dan menyimak pesan-pesan dari tembang-tembang yang mereka nyanyikan tersebut.

Sayangnya, sejak mesin *huller* (mesin penggiling padi) diperkenalkan, pemrosesan padi menjadi beras yang dilakukan dengan menggunakan alu dan lesung sudah semakin ditinggalkan karena pertimbangan ekonomis, sehingga dengan sendirinya kesenian *Kotekan Lesung* sudah menjadi kegiatan ‘langka’ yang ditunggu-tunggu masyarakat sekitar, selain menghibur, kesenian ini mengandung banyak makna dalam kehidupan mereka.

Kembali ke masalah kespro petani perempuan di desa Peniwen Malang, sebetulnya memutuskan untuk ikut melakukan tes *papsmear* bagi petani perempuan bukan hal yang mudah dan murah. Misalnya ketidaksediaan suami untuk mengizinkan istrinya mengikuti tes tersebut dengan alasan *papsmear* berarti ‘mempermalukan’ diri sendiri karena berhubungan erat dengan organ reproduksi perempuan yang paling pribadi (hal ini diakibatkan oleh kurang pahamnya suami tentang pentingnya *papsmear*), adalah satu dari sekian kendala yang harus petani perempuan hadapi. Selain itu, kendala lainnya adalah: perasaan takut petani perempuan seandainya hasil *papsmear*-nya kelak akan menunjukkan yang bersangkutan mengidap kanker leher rahim, serta besarnya biaya yang harus mereka keluarkan untuk pelaksanaan tes tersebut.

Untuk meningkatkan peran serta suami dalam mendukung kespro istri mereka masing-masing, dalam hal ini agar tidak melarang istri mereka ikut *papsmear*, maka penyebaran informasi manfaat dan kegunaan *papsmear* bagi petani perempuan pun dilakukan melalui diskusi pada saat mereka mengadakan pertemuan-pertemuan lingkungan (setingkat RT) yang bersifat religius (*Patuwen*: kebaktian lingkungan mingguan), dimana para suami mereka ikut hadir. Selain

itu, juga melalui kelompok kesenian lokal “*Warokan*” (sebuah kelompok seni tari dan gerak tradisional yang beranggotakan laki-laki dan perempuan, dimana pada bagian-bagian tertentu terdapat sesi salah seorang yang menjadi dalang melakukan orasi, pantun atau *woro-woro*, yang berisikan pesan-pesan tentang kehidupan mereka: umumnya bergaya ‘satire’), baik itu pada saat latihan persiapan maupun ketika pertunjukan *Warokan* itu sendiri berlangsung.

Pertunjukan ini menyelipkan pesan, ajakan untuk mendukung istri atau para perempuan agar memperhatikan kespronya dengan ikut *papsmear*. Selain itu, sengaja ditumbuhkembangkan kesadaran seluruh anggota keluarga untuk mengalokasikan secara khusus “dana sehat” bagi kepentingan kespro antara lain melalui:

- *jimpitan* beras bagi anggota kelompok tani perempuan dan kelompok seni *warokan*, dan atau
- menabung, dengan menyisihkan minimal sebanyak harga 1 batang rokok bagi para suami perokok sekali dalam dua hari, dan lain-lain.

Sementara melalui kelompok tani perempuan, masing-masing yang memiliki usaha bersama kelompok, seperti: usaha tani padi organik, beternak sapi atau kambing, maka sebagian dari keuntungan yang diperoleh dipergunakan untuk mensubsidi 50 % biaya *papsmear* anggota satu kali dalam setahun.

Namun tidak berhenti sampai di situ saja, mereka pun membuat jaringan dengan sesama kelompok-kelompok tani perempuan yang ada di desa lain di kabupaten Malang, dan bahkan juga dengan kelompok-kelompok tani perempuan yang ada di 7 kabupaten lain di Jawa Timur



Foto: YPP Malang

dalam sebuah serikat petani perempuan untuk saling bertukar informasi tentang hal-hal yang menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka sebagai petani perempuan. Dengan cara ini pula, petani perempuan di desa Peniwen ini menjadi tahu bahwa biaya *papsmear* di Kabupaten Tulung Agung lebih murah jika dibandingkan dengan di puskesmas tempat mereka akan melakukan *papsmear*, atau seperti bagaimana petani perempuan di Kabupaten Jombang memperoleh potongan biaya pelaksanaan *papsmear*.

Berbekal informasi-informasi tersebut di atas, mereka melakukan lobi kepada Kepala Puskesmas Kromengan, Kecamatan Kromengan, Kabupaten Malang agar biaya setiap kali tes perorang diturunkan. Akhirnya setelah diskusi yang panjang mereka pun berhasil mencapai kesepakatan, yaitu: *papsmear* dilakukan secara kolektif dengan minimal peserta sebanyak 20 orang setiap hari Jumat, dengan biaya tes turun dari 25.000 rupiah menjadi Rp. 20.000 rupiah perorang.

Berdasarkan data dari Puskesmas Kromengan, sebelum tahun 2002, jumlah peserta *papsmear* dari desa Peniwen awalnya kurang dari 10 orang dan berasal dari perempuan elit desa, tetapi kemudian menjadi 40 orang. Dan pada tahun 2003 lalu, dari jumlah seluruh peserta *papsmear* di Puskesmas Kromengan, Kabupaten Malang, yang berasal dari desa Peniwen mencapai 90% yaitu sebanyak 98 orang, yang mana 86 orang diantaranya adalah petani perempuan.

Tentu saja pencapaian kesadaran seperti ini tidaklah dengan mudah diraih. Selain melalui "sekolah lapang", sosialisasi melalui kesenian lokal, seperti tersebut di atas, para petani perempuan di desa Peniwen pun melakukan kampanye publik, melalui penyebaran poster, pamflet, spanduk, brosur, dan lain-lain pada saat acara Temu Tani, dan bahkan pada saat mereka menjadi peserta 'Karnaval Tujuhbelasan', (karnaval dalam rangka memeriahkan HUT RI yang sudah mentradisi bagi masyarakat desa Peniwen karena telah berlangsung sejak awal tahun 1970-an). Sehingga tidaklah mengherankan jika pada tahun 2004 ini petani perempuan di desa Peniwen terpilih untuk mewakili kecamatan Kromengan dalam ajang lomba Program Penanggulangan Kanker Terpadu Paripurna (P2KTP) tingkat Kabupaten Malang.

*Proficiant* petani perempuan Desa Peniwen!

# Video Jurnal Perempuan

Jangan lewatkan VCD tentang "**Kekerasan terhadap Perempuan**" yang diproduksi YJP pada tahun 2000 yang mengangkat tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan diseluruh dunia. Beserta komentar para tokoh seperti Nelson Mandela, Bianca Jagger, Radhika Coomraswamy, Hj. Khofifah Indar Parawangsa dan masih banyak lagi.



*Film Director:* Miranti Hidajadi



**Perempuan di Wilayah Konflik.** VCD yang diproduksi YJP tahun 2002 ini mengangkat isu-isu perempuan ditiga wilayah konflik di Indonesia: Aceh, Poso dan Papua. Persoalan perempuan di barak pengungsian, masalah trauma, jaminan rasa aman, pelecehan serta kekerasan seksual menjadi tema utama dalam dokumentasi film ini. Sebuah liputan yang perlu untuk diketahui berbagai kalangan.

*Film Director:* Angela Nicoara

BHAKTI - DHARMA - WASPADA

Perdagangan perempuan dan anak masih saja marak, sekalipun upaya membongkar praktek perdagangan itu sudah banyak dilakukan. Ini membuktikan persoalannya memang pelik. Penanganannya hanya bisa dilakukan bila semua pihak baik pejabat, akademisi, aparat, tokoh masyarakat, profesional, LSM, media massa maupun elemen masyarakat lainnya berkomitmen untuk memberantas perdagangan perempuan dan anak.

Melalui penelitian dan kegiatannya di lapangan, Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) menampilkan dan mengemas persoalan perdagangan perempuan dan anak dalam media VCD & DVD, produksi YJP tahun 2003.

*Film Director:* Gadis Arivia



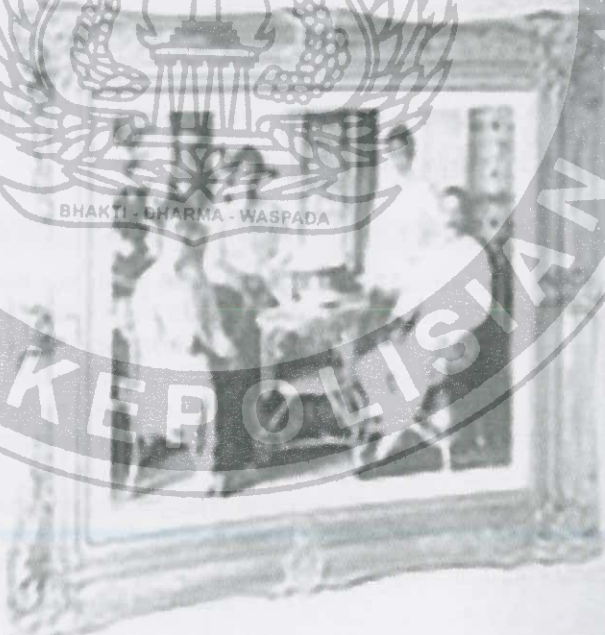
**Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut.**

Jl. Tebet Barat VIII No. 27  
Jakarta Selatan 12810

# Recalling the Indies

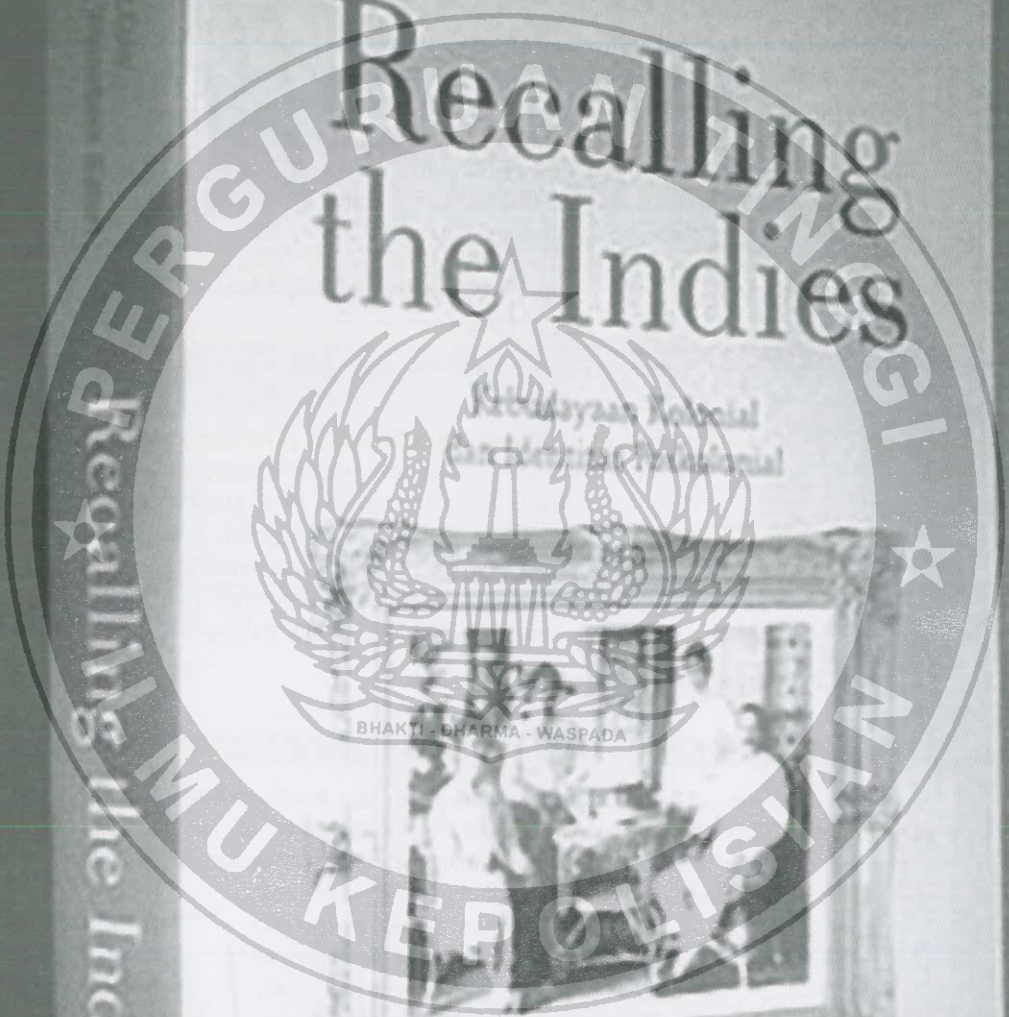


BHAKTI - DHARMA - WASPADA



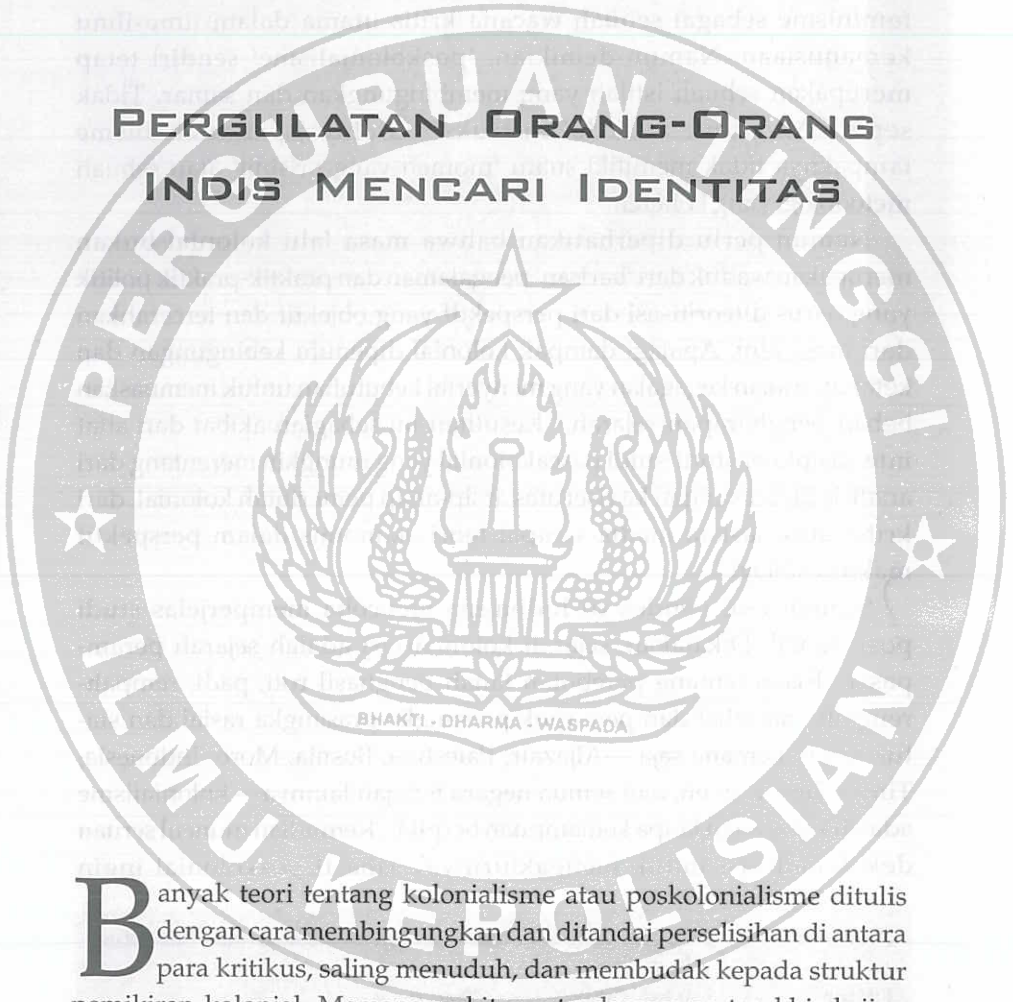
Recalling the Indies

Joint Core  
Eros Westerbeek (Editor)





## PERGULATAN ORANG-ORANG INDIS MENCARI IDENTITAS



**B**anyak teori tentang kolonialisme atau poskolonialisme ditulis dengan cara membingungkan dan ditandai perselisihan di antara para kritikus, saling menuduh, dan membudak kepada struktur pemikiran kolonial. Memang, sekitar satu dasawarsa terakhir kajian poskolonial muncul sebagai titik temu dan pertarungan bagi beragam disiplin dan teori. Sementara ia memungkinkan terjadinya dialog interdisipliner dalam ilmu-ilmu humaniora, akan tetapi tetap sulit untuk menggabungkan teori-teori yang saling bertentangan –seperti Marxisme dan poststrukturalisme dalam membaurkan banyak keragaman pendekatan. Sebagai konsekuensinya terjadi konsensus kecil mengenai isi, ruang lingkup, dan relevansi yang sesuai dari kajian-kajian poskolonial.<sup>1</sup>

Menurut Leela Gandhi, poskolonialisme telah memainkan peran khusus dengan teori-teori semacam postrukturalisme, psikoanalisis dan feminisme sebagai sebuah wacana kritis utama dalam ilmu-ilmu kemanusiaan. Namun demikian, 'poskolonialisme' sendiri tetap merupakan sebuah istilah yang membingungkan dan samar. Tidak seperti Marxisme atau dekonstruksi misalnya, poskolonialisme tampaknya tidak memiliki suatu 'momen yang orisinal' atau sebuah metodologi yang koheren.

Namun perlu diperhatikan bahwa masa lalu kolonial bukan merupakan waduk dari 'barisan' pengalaman dan praktik-praktik politik yang harus diteoritisasi dari perspektif yang objektif dan tercerahkan dari masa kini. Apalagi dampak kolonial dipenuhi kebingungan dan ketakutan akan kegagalan yang menyertai kebutuhan untuk memuaskan beban pengharapan sejarah.<sup>2</sup> Kesulitan ini sebagian akibat dari sifat interdisipliner studi-studi pascakolonial yang mungkin merentang dari analisis literer sampai ke riset atas arsip-arsip pemerintah kolonial, dari kritik atas naskah media sampai teori ekonomis dalam perspektif makrososiologi.<sup>3</sup>

Sebuah esai pendek di Indonesia mencoba memperjelas studi poskolonial. Dikatakan, sejarah kolonialisasi adalah sejarah perampasan. Kisah tentang perebutan tanah penghasil roti, padi, rempah-rempah, martabat dan pemupuk prasangka-prasangka rasial dan status sosial. Dimana saja —Aljazair, Palestina, Bosnia, Moro, Indonesia, Timor-Timur, Aceh, dan semua negara terjajah lainnya— kolonialisme adalah kekuasaan tanpa kemampuan berpikir. Kemudian muncul seruan dekolonialisasi untuk mengakhirinya. Alhasil poskolonial ingin

<b>Judul</b>	: <i>Recalling the Indies: Kebudayaan Kolonial dan Identitas Poskolonial</i>
<b>Editor</b>	: Joost Cote' & Loes Westerbeek
<b>Penerjemah</b>	: Abdul Wachid
<b>Pengantar</b>	: Bambang Purwanto
<b>Penyunting</b>	: Rumekso Setyadi & Suhaelan Z Wafa
<b>Penerbit</b>	: <i>Syarikat Indonesia (Yogyakarta) bekerjasama dengan Institute for Globalization and Citizenship Deakin University (Australia)</i>
<b>Cetakan</b>	: Pertama, April 2004
<b>Tebal</b>	: xix + 426 halaman
<b>Harga</b>	: 48.000,00

menggugat mereka yang berusaha menggenggam otentisitas budaya secara cerdas, kritis, dan inovatif. Poskolonial melakukan itu semua bukan dengan propaganda peperangan dan kekerasan fisik, tapi dialektika dalam arena yang lebih subtil, yakni kesadaran.<sup>4</sup>

### Dulu Menjajah, Kini Terjajah

Indis adalah keturunan campuran Hindia Belanda (Indonesia *tempo doeloe*) dan Belanda yang lahir pada masa abad ke-19 dan dekade awal abad ke-20, atau campuran Belanda-Belanda yang lahir di Hindia Belanda. Realitas Indis dalam buku ini merupakan realitas Indonesia masa lalu. Sebagai realitas historiografi tentu bukan sesuatu mengherankan jika melihat ideologi dan metodologi di belakang tradisi historiografi Indonesia sentris. Sebagai hasil dialektis dari proses historis Indonesia saat menjadi koloni Belanda dan tradisi historiografi kolonial sentris, penulisan sejarah Indonesia oleh orang Indonesia dan wacana historis yang berkembang di dalam masyarakat sangat mudah terjebak dalam simplifikasi terminologis ketika berhadapan dengan berbagai kategori sosial yang ada dalam realitas sejarah.

Barat dan campuran antara Barat dengan Indonesia diklasifikasi ke dalam satu kategori sosial berseberangan secara frontal dengan Indonesia yang memiliki hak penuh atas masa lalu. Barat dan unsur-unsur lain yang melekat di dalamnya selalu dianggap sebagai representasi dari kolonialisme dan imperialisme sehingga tidak punya hak untuk menjadi bagian dari sejarah Indonesia, kecuali sebagai kekuatan penekan yang destruktif terhadap proses menjadi Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan kemudian, Indis dianggap identitas campuran yang merupakan *partner* (sampai tingkat tertentu disebut lawan dari) "Belanda *Totok*" (orang keturunan dan lahir di Belanda) berusaha lepas dari identitas Indonesia dan ingin masuk ke dalam identitas Barat. Pada konteks terakhir ini, Indis seolah-olah identik dengan Indo walaupun secara konseptual dan realitas historis dua hal itu berbeda. Bambang Purwanto mengatakan, seharusnya tidak ada alasan tepat untuk mengeluarkan Indis dari Indonesia. Sebabnya, mereka menjadi salah



Foto: Kholilul Rohman, Ahmad

satu mediator penting dalam membentuk identitas baru masyarakat lokal yang diwariskan kepada mereka yang menyandang identitas Indonesia kemudian.<sup>6</sup>

Berbagai ilustrasi yang menghias buku ini secara jelas menunjukkan fungsi Indis sebagai varian sosial dan budaya yang membentuk Indonesia.<sup>7</sup> Apalagi mereka dipaksa ikut dalam merespon nasional terhadap transisi dari zaman kolonial menuju zaman poskolonial, di Belanda (negara yang menderita akibat kehilangan kekuasaan dan status), di Indonesia (negara yang merayakan kemerdekaannya dan mengusir kolonialisme) dan di Australia (negara yang sekian lama menolak untuk mengakui ke-Asia-an selain pengertian negatif).

Meminjam konsep Benedict Anderson tentang bangsa sebagai 'komunitas terbayang' (*imagined community*)<sup>8</sup>, orang dapat berpendapat bahwa buku ini menguraikan kronik dua bagian dari empat ratus tahun sejarah perjalanan sebuah bangsa yang membentang dari tahun 1600 sampai sekarang. Hal ini merupakan klaim luar biasa untuk mengangkat eksistensi komunitas Indis. Di sinilah titik sentral buku ini, mencoba menguraikan pergulatan mereka karena oleh orang lain tidak diakui sebagai bangsa.

Oleh karenanya, "Tanah Air" Belanda, asal mula kebudayaan Indis, "Indis Asli", "kebudayaan Indis" tidaklah semata-mata termanifestasi dalam ingatan, dalam catatan, dalam rekonstruksi. Namun ia juga terus memanifestasikan dirinya dalam sikap, ritual dan lingkungan. Di negara-negara seperti Australia sebagaimana tercermin dalam rumah beberapa keluarga, di Belanda dalam sejumlah bagian dari beberapa kota seperti Den Haag: di Indonesia dalam arsitektur perkotaan, dalam interior di banyak rumah di Jawa, dan nampaknya berkembang pula di kafe-kafe, ingatan-ingatan tersebut diberikan bentuk fisik. Karenanya ia merupakan bagian dari Indonesia sebagaimana ia juga menjadi bagian dari Belanda, dan sedikit lebih luas menjadi bagian negara-negara seperti Australia, Kanada, Selandia Baru, dan Amerika Serikat.<sup>9</sup>

### Konteks Perempuan

Sebagian besar narasumber Indis yang diwawancarai buku ini perempuan. Dipilih perempuan karena dinilai sebagai sosok kuat ingatan tentang masa lalu, khususnya ingatan paling sedih dan senang. Biasanya laki-laki sudah tak begitu menghiraukan masa lalu. Pengakuan

di atas terungkap selama mereka bermigrasi dari Hindia Belanda ke Belanda yang diidentifikasi sebagai *repatriasi* dan orang-orangnya dikenal sebagai *repatriat*. Selama mereka menghabiskan waktu di Belanda, para perempuan sadar akan perbedaan antara orang-orang Belanda Eropa dan kebudayaannya dengan kultur kolonial yang telah mereka alami di Hindia Belanda.

Ketika mereka harus menjalani hidup di wilayah yang tak pernah dikenal, muncul reaksi tentang meningkatnya perhatian yang diberikan di Australia terhadap pengalaman perempuan Eropa selama Perang Pasifik. Namun selama bertahun-tahun kisah-kisah tentang perempuan-perempuan sipil selama peperangan, tentu saja apa yang terjadi pada orang non-Australia secara umum, telah diabaikan di bawah gelombang kisah-kisah tentang laki-laki 'penggali' kepahlawanan dan penderitaan.<sup>10</sup>

Fenton Huie adalah salah satu dari pengarang pertama yang mengungkapkan laporan tentang peran perempuan-perempuan Eropa di dalam kamp penahanan melalui *The Forgotten Ones*. Tahun 1994 Jan Ruff O'Herne memecah lima puluh tahun kebisuan tentang pengalamannya sendiri sebagai perempuan muda ketika dia dipenjarakan oleh tentara Jepang di Pulau Jawa dan dipindahkan ke sebuah rumah pelacuran rahasia untuk para pegawai Jepang. Ia dipaksa untuk menanggung pukulan dan perkosaan tak terhitung jumlah dalam buku *50 Years of Silence*. Ruff juga membuat karya dokumenter disiarkan secara nasional di Australia tentang kisah perjalanannya ke Tokyo ketika dia memberikan bukti dan kesaksiannya dalam sebuah dengar pendapat publik internasional.

Pada tahun 1996 John Misto menerima hadiah tertinggi untuk penulisan skenario terbaik yang ditawarkan di Australia untuk permainannya dalam *Shoe-Horn Sonata*. Film ini didasarkan pengalaman nyata para perawat tentara dan perempuan sipil Australia, Inggris, dan Belanda yang ditangkap oleh tentara Jepang selama Perang Dunia II. Pada tahun 1997 kisah perempuan-perempuan tersebut dibawa ke hadapan publik yang lebih luas melalui film *Paradise Road* (sutradara Bruce Beresford). Film ini mengikuti cerita tentang para perempuan yang selamat ketika mereka ditangkap di Sumatera dan ditempatkan di dalam sebuah kamp tawanan perang Jepang.<sup>11</sup>

Reaksi publik atas laporan-laporan mutakhir tersebut cukup beragam. Antara lain, *pertama*, mereka bersifat kritis terhadap fakta cerita-cerita

tersebut yang fokus utamanya pengalaman kaum perempuan yang ditangkap dan dimasukkan dalam kamp tahanan sipil oleh tentara Jepang, dan bukan tentang pengalaman perang dari mereka yang tinggal di luar kamp. *Kedua*, mereka merasa pengalaman mereka berbeda dan apa yang digambarkan dalam publikasi atau penggambaran dalam film lebih dari sekadar ketajaman atau menyusun catatan yang jujur.<sup>12</sup>

Tersurat buku ini berisi pergulatan orang-orang Indis mencari identitas. Namun melalui buku ini pembaca dapat menangkap pesan tersirat tentang pertarungan wacana kolonial (dulu, mereka menjajah) dan poskolonial (kini, mereka terjajah) yang coba dihentakkan untuk merangsang publik untuk menyikapi mereka yang kini menjadi komunitas minoritas. Seraya menunggu hak-hak mereka sebagai manusia untuk dipenuhi. Secara sederhana buku ini hendak mengungkap penderitaan orang-orang Indis ketika wacana multikulturalisme<sup>13</sup> menjadi keniscayaan bagi berbagai bangsa dan secara terbuka menyatakan penolakan terhadap kolonialisme. Dalam konteks Indonesia, menjadi sebuah tantangan bagi para pemimpin bangsa ini meskipun sikap masa lalu mereka (bekas penjajah) sulit dihilangkan begitu saja. (Kholilul Rohman Ahmad)

---

### Catatan Belakang

<sup>1</sup> Leela Gandhi, *Teori Poskolonial: Upaya Meruntuhkan Hegemoni Barat*, (terj.) Yuyun Wahyutri dan Nur Hamidah (Yogyakarta: Qalam, 2001) hal. viii

<sup>2</sup> Leela Gandhi, *ibid*, hal. 6-7.

<sup>3</sup> Ania Loomba, *Kolonialisme/Pascakolonialisme*, (terj.) Hartono Hadikusumo, (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2003). Menurut Loomba, bukan hanya karena studi-studi kolonial ini meliputi bidang yang sangat luas, lantas berarti kita harus membatasi diri dan hanya mempelajari kasus-kasus tertentu, tanpa mencoba berpikir tentang struktur-struktur pemerintahan dan pemikiran kolonial yang lebih luas. Bagaimana kita mempertemukan sifat umum dan khusus? Kadang-kadang diasumsikan bahwa kisah-kisah lama tentang kolonialisme tidak teoritis karena didasarkan pada studi empiris atas peristiwa-peristiwa tentangnya, sementara studi-studi belakangan dinilai teoritis karena tidak membatasi diri pada peristiwa-peristiwa aktual. Ini adalah kesalahpahaman. Bagaimanapun juga kolonial dan poskolonial juga teoritis karena didasarkan pada asumsi-asumsi yang luas tentang sifat dan kontak kolonial, atau pertentangan tentang isu-isu tentangnya, (hal. xiii).

<sup>4</sup> Muhidin M Dahlan, *Postkolonial dan Mukjizat Kemerdekaan yang Tak Kunjung Tiba*, harian Kompas, 7 Juli 2002.

- <sup>5</sup> Bambang Purwanto, *Indis: Mereka yang Terlupakan oleh Historiografi Indonesia*, kata pengantar *Recalling the Indies*, hal. vi.
- <sup>6</sup> *Ibid*, hal. viii.
- <sup>7</sup> Kata Pengantar editor, hal. xx.
- <sup>8</sup> Lebih detail, lihat, Benedict Anderson, **Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang**, (terj.) Omi Intan Naomi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar-Insist Press, edisi Revisi, 2001). Judul asli buku ini *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Semula edisi Indonesia pertama buku ini diterbitkan oleh penerbit yang sama berjudul *Komunitas-Komunitas Imajiner: Renungan tentang Asal-Usul dan Penyebaran Nasionalisme*. Namun karena edisi pertama itu banyak kesalahan penerjemahan dan editing, maka diganti edisi revisi itu dan diberi kata pengantar Daniel Dhakidae.
- <sup>9</sup> *Ibid*, hal. xxvii.
- <sup>10</sup> *Ibid*, hal. 386.
- <sup>11</sup> Lihat, *ibid*, dalam *end note* nomor 25, hal. 404.
- <sup>12</sup> *Op.cit*, hal. 387.
- <sup>13</sup> Lihat, Will Kimlycka, **Kewargaan Multikultural: Teori Liberal Mengenal Hak-hak Minoritas**, (terj.) Edlina Hafmini Eddin, (Jakarta: LP3ES, 2003). Resensi versi komplit buku ini ditulis Tasyriq Hifdzillah dipublikasikan *Jurnal Perempuan* edisi 33 Januari 2004 berjudul "Multikulturalisme, Relevansi dan Upaya Menyuarakan Kaum Perempuan".

Berita menjadikan  
peristiwa mempunyai arti

Dapatkan rekaman berita perempuan  
di media massa melalui

Layanan Kliping  
Berita Perempuan

Yayasan Jurnal Perempuan

Hubungi:

Yayasan Jurnal Perempuan

Jl. Tebet Barat VIII No. 27 Jakarta Selatan 12810

Phone (021) 8370 2005 (Hunting)

Fax (021) 8302434

e-mail : yjp@yjp.or.id

## Anak Jalanan Perempuan: Rentan Terjerat Trafiking

Judul : Prostitusi Anak Jalanan Di  
Simpang Lima  
Penulis : Hana Prabandari  
Pengantar : Mohammad Farid  
Cetakan : Pertama, 2004  
Penerbit : Yayasan Setara atas dukungan  
*Terre des Hommes Germany*  
Jumlah hal. : xxxiv, 110 hlm.



Semarang ternyata kota yang tidak luput dari maraknya prostitusi anak-anak perempuan. Wilayah yang terkenal dengan penjualan anak-anak perempuan untuk eksploitasi seks di Semarang ini terdapat di Simpang Lima, sebuah tempat di jantung kota Semarang yang mempertemukan lima jalan, yaitu Jalan Pandanaran, Jalan Gajahmada, KH. Ahmad Dahlan, Ahmad Puspa dan Jalan Pahlawan. Aktivitas di kawasan ini tidak pernah surut dan jumlah orang yang berada dalam wilayah prostitusi jalanan ini mengalami peningkatan yang pesat. Bundaran Simpang Lima ini telah menjual sekitar 50-70 perempuan baik anak-anak maupun dewasa. Usia di bawah 14 tahun bahkan mencapai 30%, sedangkan usia 14-17 tahun 50% dan 17-20 tahun sebanyak 20%.

Ramainya prostitusi anak di wilayah ini bahkan menciptakan stigma-stigma baru terhadap anak-anak perempuan yang berseliweran di sana dengan istilah *ciblek* singkatan dari *cilik-cilik betah melek* (artinya kecil-kecil kuat melek, atau *cilik-cilik isa digemblek* kecil-kecil bisa diajak apa saja). Untuk perempuan dewasa masyarakat menempelkan stigma *prenjak* (perempuan *nunggu diajak*). Mall di kawasan Simpang Lima ternyata juga menjadi tempat melacurkan anak. Anak-anak ini rata-rata masih bersekolah di SMP dan SMU.

Buku yang ditulis oleh Hanna Prabandari dari Universitas Negeri Surakarta ini adalah hasil adopsi dari skripsinya yang merupakan hasil kerja selama bergulat dengan anak jalanan perempuan di kawasan Simpang Lima selama



enam bulan. Hasil penelitian yang ditulis dengan gaya penulisan yang deskriptif tentang kondisi pelacuran anak jalanan perempuan ini telah memberi kontribusi bagi pemahaman lebih lanjut tentang kondisi pelacuran anak di Indonesia.

Dengan gaya tulisan yang deskriptif, buku ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang faktor-faktor apa saja yang bisa menjerumuskan anak, khususnya anak jalanan perempuan ke dalam prostitusi. Kasus-kasus dan pengalaman-pengalaman anak-anak perempuan yang diceritakan oleh Hanna Prabandari ini ternyata termasuk dalam kategori korban trafiking (perdagangan manusia). Mereka diajak untuk bekerja di warung teh poci dan nasi ayam di bundaran Simpang Lima. Warung-warung itu berupa warung tenda yang bisa dibongkar pasang. Biasanya pedagang mendirikan warung sekitar pukul 02.00 – 03.00 karena keesokan harinya kawasan itu harus bersih. Di warung teh poci ini dikelola oleh perempuan-perempuan yang usianya relatif masih muda. Supaya warungnya laku, mereka berdandan dan mengajak 2-3 anak perempuan yang bertugas menarik pengunjung agar mau mampir ke warungnya. Dari sinilah terjadi transaksi seks, bahkan anak-anak perempuan itu sampai dibawa ke hotel-hotel di kota Semarang.

Dari wawancara yang dilakukan

Hanna terhadap anak-anak yang dilacurkan ini, kebanyakan kegiatan mereka ternyata diketahui oleh orang tua dan tetangga mereka. Tampaknya terjadi pergeseran sikap di kalangan yang terlibat dalam prostitusi untuk tidak takut diketahui kegiatannya oleh masyarakat. Orang tua ternyata juga menikmati hasil kerja anak, terutama bagi keluarga yang sangat miskin.

Seperti yang terjadi dengan Melati 15 tahun, (bukan nama sebenarnya) saat adiknya lahir, ayahnya berselingkuh dengan perempuan lain. Perceraian kemudian terjadi pada orang tuanya, dan Melati ikut ibunya sedangkan adiknya ikut ayahnya. Tak lama kemudian ibunya menikah lagi dan mempunyai dua orang anak. Ibunya berjualan bumbu dapur, Melati membantu ibunya, yaitu mengumpulkan sisa-sisa bumbu, sayuran dan buah-buahan saat bongkar muat di pasar. Di pasar Johar itulah Melati bergaul dengan anak-anak jalanan yang berkeliaran, ia sering menghabiskan waktu di Simpang Lima dan mengenal banyak orang seperti pedagang teh poci dan lainnya. Di sanalah ia ditawarkan pemilik warung teh poci untuk bekerja, dan ternyata dijebak dalam prostitusi. Melati ditawarkan oleh seorang laki-laki dan diberi imbalan RP. 500.000. Ibunya kemudian marah mengetahui aktivitas Melati ini. Tetapi kegiatan Melati dapat membantu kebutuhan

keluarga, sehingga ibunya mendukung saja, bahkan mengantar Melati membersihkan vaginanya ke rumah sakit setiap bulan.

Pengalaman-pengalaman lainnya dirasakan pula oleh Mawar (17 tahun), Harum (16 tahun), Sekar (16 tahun) dan Puspa (16 tahun). Dari pengalaman yang diceritakan oleh anak-anak perempuan ini, ditemukan beberapa alasan yang sama sehingga anak-anak tersebut terjebak dalam prostitusi. *Pertama* karena tekanan keluarga, *kedua* situasi anak jalanan, *ketiga* karena merasa tidak perawan lagi akibat perbuatan pacar yang tidak bertanggungjawab. *Keempat* kesulitan ekonomi dan keinginan mendapatkan uang yang lebih besar semakin mendorong mereka terjebak masuk ke dalam prostitusi.

Demikianlah, buku ini berhasil menunjukkan bahwa berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi yang berlangsung di dunia jalanan telah menempatkan mereka sebagai sasaran korban paling potensial untuk terjerumus dalam dunia prostitusi. Ironis sekali ketika kita mengetahui bahwa Indonesia termasuk negara yang paling awal meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA). Dalam salah satu ketentuannya, yakni pasal 34 secara tegas mengakui hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, dan sekaligus mewajibkan kepada pihak negara untuk memberikan perlindungan yang memadai serta menjamin layanan pemulihan psikologis dan pemulihan sosial bagi anak-anak korban. (MA)



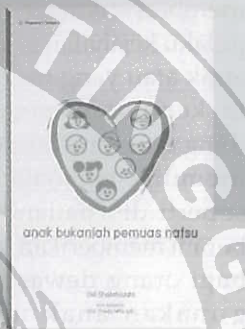
**Ikuti Jurnal Perempuan edisi 37 mendatang dengan tema**

# REMAJA PUTRI MELEK MEDIA

*Jurnal Perempuan*  
untuk pencerahan dan keadilan

# Eksplorasi Seksual Terhadap Anak Perempuan: Sampai Kapan?

Judul : Anak Bukanlah Pemuas Nafsu  
Penulis : Odi Shalahuddin  
Pengantar : Dra. Frieda NRH. MS  
Cetakan : Pertama, 2004  
Penerbit : Yayasan Setara atas Dukungan  
*Terre des Hommes Germany*  
Jumlah hal. : xxii, 106 hlm.



Buku ini dibuka oleh kasus yang pernah terjadi di Semarang menyangkut skandal seorang tokoh LSM Anak Jalanan yang ternyata ikut melecehkan, mengeksploitasi yang berarti melakukan kekerasan kesekian kalinya terhadap anak-anak jalanan perempuan. Skandal ini memang menjadi tragedi mengingat tokoh LSM tersebut diharapkan untuk menjadi pendamping, pelindung dan memberdayakan korban-korban eksploitasi seks anak jalanan tetapi malah melakukan sebaliknya. Kasus ini telah terbuka dan menyebar menjadi berita di banyak media massa baik lokal maupun nasional. Tercatat sekitar 15 anak perempuan dan dua perempuan dewasa menjadi korban tindakan-tindakan yang dilakukan meliputi pelecehan secara fisik seperti meraba-raba dan menciumi korban, merayu anak agar bersedia

diajak berhubungan seksual, meminta anak untuk melakukan hubungan seksual di depan pelaku, dan perkosaan. Kasus ini akhirnya terbuka karena dari para korban, dua diantaranya telah melaporkan diri ke Kepolisian Kota Besar Semarang tahun 2000 yang lalu.

Dari kasus inilah penulis kemudian terhentak untuk produktif menulis di berbagai media massa untuk menunjukkan kepekaan akan kebutuhan-kebutuhan hakiki anak. Baginya, kasus ini tentu saja menambah keprihatinan yang mendalam terutama di tengah situasi dan kondisi anak jalanan perempuan yang sangat buruk. Buku ini merangkum bermacam tulisannya tentang hak-hak anak dan kasus-kasus kejahatan seksual yang menimpa mereka serta tuntutan terhadap hukum di Indonesia yang masih saja tidak

berpihak pada anak perempuan sebagai korban kejahatan seksual.

Odi Shalahuddin, penulis buku ini banyak menunjukkan beberapa peraturan negara kita yang memberi hukuman ringan kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak atau yang melacurkan anak. Ia kemudian membandingkan dengan negara lainnya yang juga memiliki persoalan yang sama seperti di Thailand yang sudah berani memberikan hukuman mati bagi orang dewasa yang menggunakan anak untuk tujuan seksual. Demikian pula di Philipina, hukuman mati yang semula telah dihapus pada tahun 1987 kembali diterapkan pada tahun 1994.

Penulis buku ini kemudian memberi sampel tentang maraknya prostitusi anak jalanan di Semarang terutama di kawasan Simpang Lima sebagai jantung kota Ibukota Jawa Tengah ini. Ia kemudian menekankan bahwa maraknya prostitusi yang menyebar ke mana-mana tersebut akibat ditutupnya lokalisasi prostitusi. Menurutnya penutupan lokalisasi bukan upaya yang efektif untuk menghapus prostitusi. Kesalahan tindakan ini diakui oleh DPRD Jawa Tengah yang mengatakan menutup lokalisasi sama saja menutup *septic-tank* rumah, dan kotoran-kotoran pun bertebaran di ruang makan, tempat tidur dan di segala ruang.

Memang betul demikian, temuan di lapangan oleh beberapa LSM

menunjukkan bahwa sebelum penutupan lokalisasi tersebut, jumlah germo sebanyak 147 dengan 350 PSK dan setelah ditutup meningkat menjadi 150 germo dan 509 PSK. Tempat-tempat transaksi menjadi berpindah ke pinggiran jalan dan warung-warung tenda, diantaranya tenda-tenda yang menjajakan teh poci. Jumlah warung-warung ini menjamur dari 10 pedagang nasi dan teh poci menjadi 25 pedagang yang juga menjajakan anak-anak perempuan sebagai PSK. Merembaknya prostitusi jalanan menarik anak-anak jalanan perempuan masuk ke dalamnya. DPRD kota Semarang pun kewalahan atas persoalan ini, terutama ketika masyarakat mendesak penanganan segera. Para anggota dewan akhirnya tidak segan-segan terjun langsung untuk melakukan pengamatan, dan dirancanglah Peraturan Daerah untuk membasmi prostitusi jalanan tersebut.

Tindakan nyata dari pemerintah Semarang memang kelihatan, tetapi sayangnya tindakan ini justru lebih banyak dikenakan pada prostitusi jalanan itu sendiri, yang tidak lain sebenarnya adalah korban eksploitasi seksual. Pihak Kepolisian gencar melakukan razia-razia yang hanya ditujukan kepada para pekerja seks komersial anak yang dilacurkan dan juga para waria. Ternyata tindakan ini bukanlah suatu pemecahan persoalan secara substansial dan hanya memin-

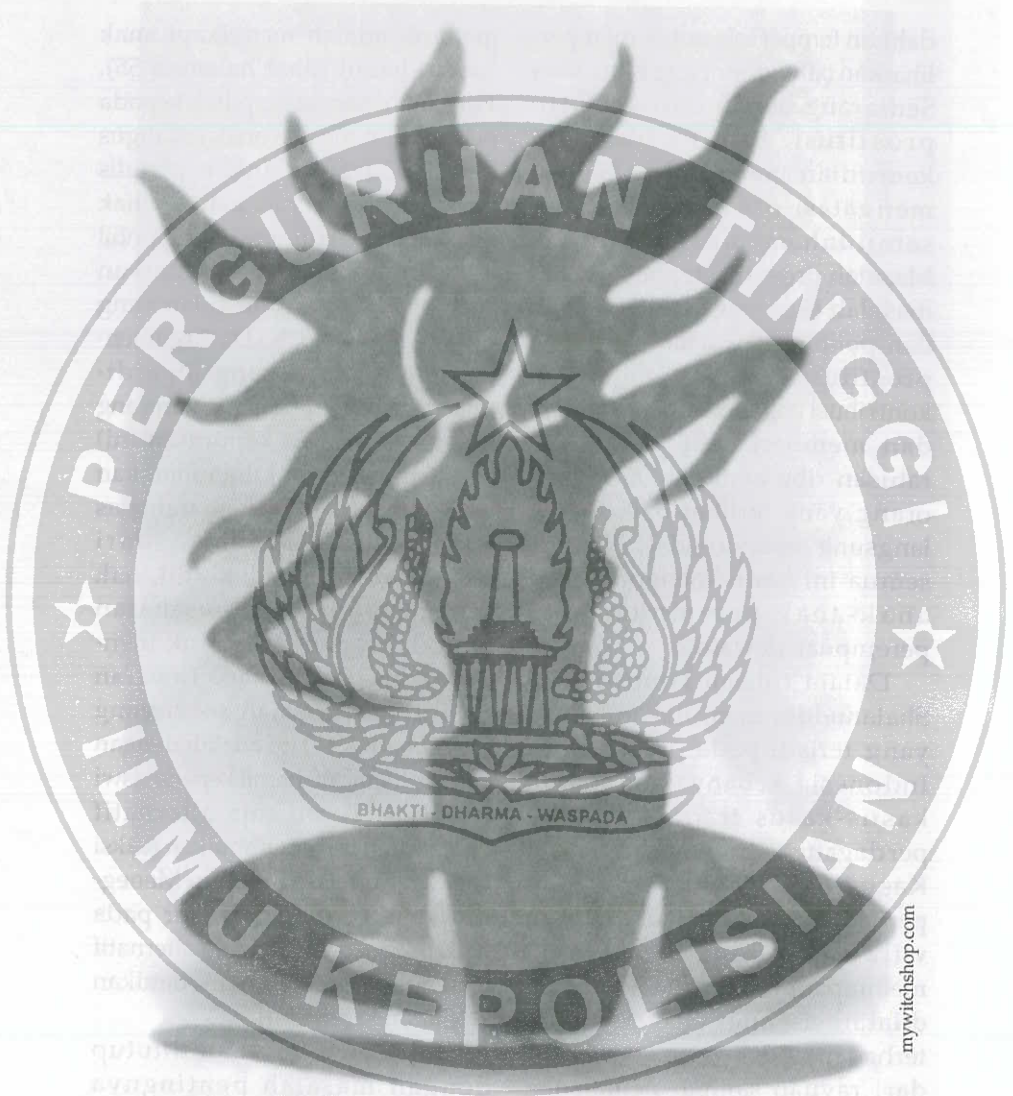
dahkan tempat saja untuk memperlihatkan bahwa Simpang Lima Kota Semarang bersih dari kegiatan prostitusi. Penulis buku ini kemudian menegaskan bahwa mengatasi prostitusi tidaklah semudah membalik tangan. Masalah prostitusi terkait dengan masalah ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kenyataannya, dunia prostitusi cukup memberikan kontribusi bagi pendapatan negara dan memberi kehidupan bagi ratusan ribu atau bahkan jutaan orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak. Namun, semua ini harus mengorbankan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa.

Dalam tulisan lainnya, Odi Shalahuddin mengatakan bahwa yang terjadi pada prostitusi di Indonesia kebanyakan adalah kasus-kasus *trafficking* atau perdagangan anak/perempuan. Kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di dalam wilayah Indonesia ataupun melampaui lintas negara ternyata dilatarbelakangi oleh penipuan terhadap calon tenaga kerja mulai dari rayuan sampai pemalsuan identitas, terutama usia. Faktor lainnya adalah penjualan anak oleh orang tuanya sendiri, atau pihak lain kepada pengguna atau mucikari dan penculikan anak yang diperdagangkan oleh suatu sindikat.

Satu tulisan dari sekian tulisan dalam buku ini yang tak kalah

menarik adalah menyikapi anak (siswi) hamil (lihat halaman 55). Tulisan ini sangat berpihak kepada perempuan sebagai anak sekaligus korban. Odi Shalahuddin, penulis buku ini tidak setuju ketika pihak sekolah pada umumnya mengambil keputusan untuk mengeluarkan siswinya karena Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD). Argumenasinya adalah (yang juga didukung oleh berbagai gugatan yang mempertanyakan keputusan ini) keputusan tersebut menunjukkan pengabaian dan pelanggaran atas hak siswi untuk bebas dari perlakuan yang tidak adil, hak sebagai konsumen kesehatan reproduksi dan hak untuk mendapatkan pendidikan. Tawaran positif atas masalah siswi yang mengalami KTD ini adalah dengan memberikan cuti hamil kepada siswi tersebut. Tentu saja alternatif pemecahan ini menimbulkan reaksi pro dan kontra. Meskipun Meneg-PP pemerintahan Gus Dur pada waktu itu sepakat dengan alternatif tersebut, tetapi belum diwujudkan ke dalam kebijakan.

Buku ini kemudian ditutup dengan masalah pentingnya perlindungan anak dari kejahatan seksual yang dikutip dari Konvensi Hak Anak pasal 34, bahwa negara harus ikut berperan dalam melaksanakan kewajiban perlindungan, pendampingan dan pemberdayaan terhadap korban anak-anak perempuan. (MA)



mywitchshop.com

# la Terus Menari Ketika Senja

Yetti A. KA